



SLEEI
Strengthening Legal Education
in Eastern Indonesia



Working Paper 5

Hukum dalam Konteks Lokal

Mengapa relevan dalam pendidikan hukum untuk memperhatikan konteks lokal?

July 2020

Herlambang Wiratraman dan Jacqueline Vel



KIT Royal
Tropical
Institute



Ministerie van Buitenlandse Zaken



nuffic
meet the world

 **Van Vollenhoven Institute**
for Law, Governance & Society



**Universiteit
Leiden**

Colophon

Makalah ini adalah bagian dari lima kertas kerja dari program “Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia” yang ditulis sebagai rujukan materi utama untuk pelatihan para dosen (fakultas) hukum di Indonesia Timur. Setiap makalah membahas salah satu tema inti program SLEEI dan menjelaskan permasalahan yang muncul dalam usaha meningkatkan materi mata kuliah hukum yang berhubungan dengan kelima tema SLEEI. Makalah-makalah ini juga berisi berbagai saran praktis tentang bagaimana mengintegrasikan perbaikan-perbaikan tersebut ke dalam berbagai mata kuliah yang sudah ada. Kelima makalah ini menjadi nafas dalam menyusun buku panduan kegiatan program SLEEI dalam memperkuat pendidikan hukum. Makalah ini disusun oleh tenaga ahli dari Indonesia dan Belanda yang tergabung dalam program SLEEI. Semua makalah, informasi program, berbagai kegiatan yang dilakukan dan info terbaru dapat ditemui di website SLEEI [Bahasa](#)¹ and [English](#)².

Dana dan koordinasi

Program SLEEI didanai oleh [NUFFIC’s Orange Knowledge Programme - ‘Security and Rule of Law in Indonesia’](#)³ dan dikoordinasikan oleh Van Vollenhoven Institute of Leiden Law School, Leiden University.

Penerbit

Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society, Leiden University

Penulis

Herlambang Wiratraman dan Jacqueline Vel

Cover photograph

Leaves of Eastern Indonesia’s iconic lontar palm. Photo: J. Vel

© 2020 VVI/Authors.

All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this report may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permission of both the copyright owner and the author(s) of the report.

¹ <https://sleei.law.ugm.ac.id/>

² <https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/law/strengthening-legal-education-in-eastern-indonesia>

³ <https://www.nuffic.nl/en/subjects/institutional-collaboration-projects/>

Hukum dalam Konteks Lokal : Mengapa relevan dalam pendidikan hukum untuk memperhatikan konteks lokal?

Meskipun pertanyaan ini mudah terjawab dan ditemukan di kampus Fakultas Hukum universitas-universitas Indonesia, pertanyaan ini menyentuh debat sensitif antara para pendukung positivisme hukum dan mereka yang lebih memilih pendekatan sosio-legal. Kelompok pertama menganggap hukum sebagai ilmu dengan metode penelitian hukumnya sendiri, sementara dalam perkuliahan tidak ada perhatian terhadap relevansi konteks sosial dari masalah hukum yang sedang dibahas. Para mahasiswa diajarkan hukum dengan cara seolah-olah hukum itu adalah mesin yang bisa ‘berjalan dengan sendirinya’: hukum positif diharapkan bisa mengatur masing-masing dan detail setiap situasi kehidupan nyata dan menjadi sangat logis sekaligus dapat diprediksi, hakim selalu dapat diakses dan penilaian mereka selalu dipatuhi. Di sisi lain dalam debat akademis, mempromosikan studi sosio-legal karena berkaitan dengan ‘konteks sistem hukum plural Indonesia yang diperlukan untuk memahami secara lengkap dan lebih solid tentang bagaimana hukum beroperasi di tengah masyarakat.’⁴ Dalam catatan ini kami memberikan lima alasan berbeda mengapa memperhatikan konteks lokal sangat relevan dalam pendidikan hukum, dan diakhiri dengan konsekuensi untuk perkuliahan.

1. Contoh-contoh inspiratif

Alasan pertama mengapa relevan dalam mengajar (secara umum) untuk memperhatikan konteks lokal adalah bahwa mengajar dan menghadiri kelas akan jauh lebih menyenangkan dan efektif. Seperti yang telah dijelaskan dalam catatan tentang metode pengajaran interaktif, salah satu cara untuk membuat kelas lebih menginspirasi adalah dengan memasukkan contoh-contoh dari masyarakat setempat yang dianggap penting bagi mahasiswa. Konsep abstrak, atau hukum dan aturan umum menerima makna ketika diterapkan pada situasi konkret yang diketahui siswa. Diskusi tentang kasus-kasus lokal juga merupakan cara mudah untuk merangsang pemikiran kritis ketika dosen mengundang mahasiswa untuk berdiskusi atau membela argumen lawan dalam kasus tersebut.

2. Berpikir kritis tentang apa itu ‘adil dan layak’?

Alasan kedua untuk memperhatikan konteks lokal adalah bahwa hal itu merangsang mahasiswa untuk berpikir tentang apa yang secara lokal dianggap ‘adil dan layak’. Hukum dan aturan hanya akan efektif dalam implementasinya jika diterima secara sosial. Di Indonesia persepsi lokal tentang ‘adil dan layak’ berbeda dari satu pulau ke pulau lain, dari satu daerah ke daerah lain, karena adanya campuran lokal tertentu dari hukum negara, hukum adat dan

⁴ Herlambang Wiratraman (2019) “The challenges of teaching comparative law and socio-legal studies at Indonesia’s Law Schools”, *Asian Journal of Comparative Law*, 14, p 229-244. (p 235)

hukum agama. Aturan mana yang paling banyak diterapkan telah menjadi dilema lama dalam penyelesaian sengketa khususnya dalam situasi pluralisme hukum.

Bayangkan, misalnya, kasus perselisihan antara seorang imigran di Timor yang meminjam tanah untuk bercocok tanam 20 tahun yang lalu dengan seorang perwakilan dari klan pemilik tanah asli. Perselisihan muncul setelah imigran menerima pembayaran kompensasi dari perusahaan perkebunan yang mengambil tanah dari imigran. Siapa yang berhak menerima kompensasi? Siapa yang memiliki klaim terkuat atas tanah, berdasarkan argumen mana? Apa yang adil? Mengapa?

Dalam hal ini ada kesenjangan antara argumen historis tentang tanah ulayat menurut hukum adat, penggunaan hak penggarap menurut adat atau kebiasaan setempat atau hukum negara, dan klaim bahwa perusahaan perkebunan dapat membuat berdasarkan hukum negara. Apa yang akan menjadi dasar bagi seorang hakim dalam situasi ini untuk mengambil keputusannya? Kasus seperti contoh ini dapat dimasukkan dalam perkuliahan tentang hukum pertanahan, dan juga dalam perkuliahan tentang hukum adat, atau dalam perkuliahan tentang aspek hukum dari pengembangan ekonomi regional.

3. Keterkaitan dengan pluralisme hukum

Di Indonesia timur, hukum adat sangat kuat di semua pulau. Selain itu hukum Islam sangat penting kedudukannya di Lombok dan pulau-pulau lain dengan penduduk mayoritasnya Islam. Oleh karena itu pembelajaran terkait dengan pluralisme hukum adalah alasan ketiga mengapa memperhatikan konteks lokal sangat relevan dalam pendidikan hukum. Inti dari pembelajaran itu adalah memahami hubungan antara sistem hukum nasional dan norma-norma dan aturan-aturan lokal dari kebiasaan atau agama, dan perbedaan karakter dan 'penalaran hukum' dari masing-masing sistem hukum yang merupakan campuran lokal. Sistem hukum nasional adalah versi adaptasi dari sistem hukum global yang awalnya diperkenalkan oleh penguasa masa kolonial. Prinsip utamanya adalah bahwa sistem hukum adalah tentang hubungan antara warga negara dan antara warga negara dan negara. Ini berarti bahwa hak-hak individu adalah sentral. Sebaliknya, prinsip utama dalam adat adalah bahwa orang dianggap sebagai anggota kelompok atau komunitas tertentu (identitas relasional) dan memiliki tugas yang sesuai dengan posisi mereka dalam suatu sistem. Terlepas dari kenyataan bahwa ini, secara filosofis, adalah kontradiksi besar, entah bagaimana selalu ada solusi yang tersedia dalam repertoar hukum jamak ini. Andrew Harding berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia sebagaimana yang berlaku dalam praktiknya bukanlah koeksistensi dua atau tiga perintah normatif yang saling bertentangan, melainkan sistem hibrid atau campuran (Harding 2002, 45)

Semua peserta dalam program SLEEI akan dapat memberikan contoh-contoh pluralisme hukum dari wilayah mereka sendiri. Banyak kasus akan berkaitan dengan hukum keluarga karena 'semakin hukum masuk ke wilayah pribadi/entitas komunitas, maka semakin menolak pengaruh asing'.⁵ Di Indonesia Timur misalnya, pernikahan, pemakaman, dan masalah warisan diatur secara lokal oleh hukum adat. Juga di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam,

⁵ Harding, A. (2002). Global doctrine and local knowledge: Law in South East Asia. *International & Comparative Law Quarterly*, 51(1), 35-53.

pluralisme hukum sangat menonjol. Berikut adalah contoh tentang pluralisme hukum mengenai wilayah pesisir.

Etika lokal, adat istiadat, dan budaya masyarakat Bajo selalu menjadi pilar penting bagi kelangsungan hidup yang membimbing mereka tentang bagaimana hidup harmonis dengan laut sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Suku Bajo menggunakan peralatan tradisional yang tidak merusak perairan laut dan terumbu karang. Mereka hanya menangkap ikan dewasa, sehingga ikan kecil diberi kesempatan untuk dewasa dan bisa berkembang biak. Salah satu aturan adat mereka menyiratkan larangan membuang limbah ke laut. Sebagai contoh, ketika kita melihat mereka memasak makanan, air yang digunakan untuk mencuci beras akan disimpan di perahu dan habis setelah mendarat. Begitu juga dengan arang dari kayu bakar, abu dapur, kulit jeruk, air cabai dan air jahe. Nelayan Bajo menghormati pembatasan limbah ini karena mereka percaya itu akan melindungi mereka dari ancaman seperti angin kencang, ombak besar, dan hantu laut yang pada gilirannya dapat memengaruhi tangkapan. Sekarang hukum lokal mereka dihadapkan dengan hukum nasional yang memungkinkan privatisasi sumber daya pesisir dan laut. Perusahaan-perusahaan pengembangan proyek tersebut merusak terumbu karang dan ekosistem pesisir, sembari mencemari lautan.

Untungnya, sejumlah hukum nasional terkait dengan sumber daya alam telah mengadopsi ketentuan hukum masyarakat adat, menawarkan potensi untuk melindungi posisi hukum masyarakat adat dan sistem ekologi mereka. Dengan semua contoh pluralisme hukum yang tersedia secara lokal, kita perlu mempertimbangkan: di mana program kurikulum pendidikan hukum yang lebih tepat untuk mereka? Kasus apa yang dicontohkan dalam tema modul?

4. Konsekuensi hukum lokal atas meningkatnya keterhubungan global

Alasan keempat mengapa penting untuk memperhatikan konteks lokal adalah meningkatnya kekuatan dan laju globalisasi di Indonesia Timur. Globalisasi memengaruhi sistem hukum di Indonesia dengan menciptakan jenis-jenis masalah baru yang perlu ditanggapi oleh para pihak yang bekerja dalam bidang hukum. Dua badan hukum sangat menonjol dalam hal ini: hukum investasi dengan legislasi ekonomi turunannya, dan hukum hak asasi manusia internasional. Kesamaan dari kedua subjek adalah bahwa hukum-hukum demikian mengubah atau membawa perubahan hukum di Indonesia, maupun hukum lokal di Indonesia, ke dalam bagian sistem hukum global, di mana mekanisme universal mempengaruhinya.

Sebuah contoh tentang bagaimana konsekuensi globalisasi ekonomi mencapai Indonesia bagian timur dijelaskan dalam artikel tentang perdagangan manusia dari pulau Sumba dan Timor.⁶ Artikel tersebut menunjukkan bagaimana migrasi tenaga kerja internasional telah mengubah perempuan dan anak-anak dari Indonesia timur menjadi “warga negara rentan yang diperlakukan sebagai komoditas dalam kerangka gerakan pasar ekonomi bebas *laissez-faire* modern”. Sementara Indonesia bagian timur di masa lalu dikenal sebagai sumber terkait perdagangan budak, perkembangan saat ini menunjukkan bahwa ‘gagasan perbudakan sebagai

⁶ Domingus Elcid Li (2018) ‘Globalisation, the role of the state and the rule of law: human trafficking in eastern Indonesia’, in Patunru, A. A., Pangestu, M., & Basri, M. C. (Eds.). *Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty*. ISEAS-Yusof Ishak Institute. P 243-264.

komodifikasi manusia telah berhasil menemukan jalan masuk kembali melalui pasar tenaga kerja Indonesia modern' (D.E. Li 2018, 258-260).

Jika contoh ini akan dibahas dalam perkuliahan hukum di Fakultas Hukum di Indonesia, apa yang akan menjadi pertanyaan hukum utama untuk menasar hal tersebut? Di mana saja tematik perkuliahan yang terkait? Keterampilan apa yang harus diperoleh lulusan hukum untuk dapat bertindak sebagai penasihat hukum berkaitan dengan Kementerian Tenaga Kerja, atau kepada organisasi non-pemerintah yang membantu para korban perdagangan manusia?

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional adalah bidang lain di mana ketegangan antara hukum lokal dan global sangat menonjol, bahkan dalam masalah hukum keluarga.

Artikel Hoko Horii⁷ mengkaji bagaimana keberadaan berbagai perintah hukum dapat berdampak pada pembelaan hak asasi manusia, dengan membahas bagaimana agen hukum negara di Bali menavigasi hukum negara melalui masalah lokal dan hukum adat dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan kehamilan anak-anak di luar pernikahan. Dalam 'situasi darurat' seperti itu di mana moralitas masyarakat dipertaruhkan, keluarga, otoritas adat dan agen negara berkolaborasi untuk menemukan cara bagi upaya menyesuaikan situasi darurat ini ke dalam sistem normatif yang diterima secara lokal, menghasilkan apa yang lembaga internasional sebut "pernikahan anak." Dalam menilai interaksi antara hukum negara dan hukum adat, penelitian ini menawarkan dasar untuk membahas bagaimana pluralisme hukum harus ditangani dalam perwujudan maju hak asasi manusia.

Implementasi HAM hanya dapat berhasil jika ada cara untuk memahami keragaman dalam struktur sosial, hubungan kekuasaan dan mekanisme tata kelola yang ada secara lokal.⁸

5. Mempersiapkan mahasiswa untuk praktik hukum

Sudah umum bahwa mahasiswa hukum kaget atau tampak tidak siap ketika mereka memasuki praktik hukum nyata. Situasi ini tidak mengherankan karena praktik hukum lebih rumit daripada teori yang telah dipelajari dalam pendidikan hukum. Mereka menghadapi tidak hanya sistem hukum yang kompleks, tetapi juga akan mengalami bagaimana politik, konteks sosial dan budaya dan aktor berpengaruh akan mempengaruhi praktik hukum. Selain itu, dengan meningkatnya perkembangan teknologi, kecerdasan buatan dan media sosial menambah faktor yang memengaruhi praktik hukum secara lokal. Oleh karena itu, klinik hukum, pembelajaran berbasis masalah sebagai metode, serta memungkinkan mahasiswa untuk melibatkan pemagangan akan bermanfaat bagi mereka dalam meningkatkan pemikiran kritis mereka dan lebih siap untuk menyelesaikan masalah hukum yang kompleks.

⁷ Horii, H. (2019). Pluralistic legal system, pluralistic human rights?: teenage pregnancy, child marriage and legal institutions in Bali. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 51(3), 292-319.

⁸ Untuk selanjutnya bisa menyimak artikel: Merry, Sally Engle (2009) *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. Chicago and London: University of Chicago Press.

Empat opsi untuk mengajar hukum dalam konteks

Yang pertama adalah mengintegrasikan aspek sosio-legal ke dalam analisis hukum. Hukum menggunakan konsep yang membutuhkan interpretasi yang tidak hanya didasarkan pada hukum, tetapi juga dalam penilaian praktik kenyataan di lapangan. Contohnya adalah bagaimana menentukan apa yang ada terkait konsep 'kepentingan terbaik anak' (*the best interest of the child*). Ahli hukum dapat menggunakan 'akal sehat' mereka untuk menafsirkan norma-norma tersebut, tetapi untuk melakukan ini dengan cara yang tepat mereka harus dapat menganalisis pertimbangan sosial dan dapat mengevaluasi keterangan yang diberikan ahli.

Yang kedua adalah meminta mahasiswa menganalisis kasus-kasus tertentu di mana para hakim mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan konteks kasus tersebut, dan mendiskusikan perbedaannya. Di atas kami sudah memasukkan beberapa contoh kasus seperti itu. Diskusi di kelas harus dipusatkan pada pertanyaan-pertanyaan bagus yang dipersiapkan dengan baik: Mengapa hakim mengambil keputusan yang aneh? Bagaimana kita bisa menjelaskan ini keanehan tersebut? Dan apa saja kepentingan berbeda yang terlibat di sini?

Pilihan ketiga adalah meminta mahasiswa memikirkan masalah sosial yang relevan secara lokal dan untuk menyusun peraturan daerah untuk mengatasinya. Ini mengharuskan mereka untuk melalui langkah-langkah berbeda yang pada akhirnya akan menentukan efektivitas peraturan dalam praktiknya - dengan kata lain, peraturan tersebut harus secara hukum sah tetapi bagaimana dengan penegakan hukum, hubungannya dengan sistem normatif lain, dll.

Pilihan keempat untuk mengintegrasikan perhatian konteks lokal ke dalam kurikulum perkuliahan hukum adalah dengan membuat perkuliahan terpisah (khusus) tentang penelitian sosio-legal, atau perkuliahan untuk mengembangkan kurikulum yang sudah ada.